

## DEMOKRASI DALAM BAYANG-BAYANG OLIGARKI (Studi Tentang Masalah Kerusakan Alam Di Kalimantan Timur)

Theobaldus Boi Sarah

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, [frrandomsf300697@gmail.com](mailto:frrandomsf300697@gmail.com)

### Abstrak

Demokrasi adalah sistem yang sejatinya memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi sistem itu terdistorsi oleh kekuatan segelintir orang yang dinamai oligarki. Kelompok kecil itu memiliki kekuatan yang sangat besar yang selalu berjuang dengan berbagai cara untuk mempertahankan hak kepemilikan atau kekuasaan material mereka. Dalam penelitian ini peneliti melakukan suatu pencarian akan pengaruh oligarki terhadap perwujudan sistem demokrasi di Indonesia. Bagaimana pengaruh oligarki itu terhadap jalannya pemerintahan demokratis dan dampaknya terhadap masalah kerusakan alam di Kalimantan Timur. Peneliti menggunakan *instrumental case study* (studi kasus) sebagai alat untuk mendalami persoalan-persoalan yang dimaksud. Temuan dari penelitian ini adalah relasi elit politik dan kelompok oligarki seringkali disatukan dengan sebuah sistem yang disebut Winters dengan sistem patronase. Sistem inilah yang kemudian melemahkan demokrasi (secara lebih luas) dan berbagai kebijakan dalam tata kelola negara oleh penguasa politis. Selain itu, adanya “perselingkuhan” antara birokrasi, politik dan oligarki, sehingga kerap kali persoalan seperti kerusakan alam akibat hadirnya industri ekstraktif seperti batu bara, dianggap biasa oleh para elit itu.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Oligarki, Kerusakan Alam, Industri Ekstraktif

### PENDAHULUAN

“Saya cenderung mempertanyakan validitas teori bahwa demokrasi adalah penyelamat atas segala kebobrokan di Indonesia saat ini”. Adakah yang baik datang dari sistem negara demokrasi? Atau justru mendatangkan banyak problem, atau kata I. Wibowo, demokrasi malah menghasilkan banyak masalah, bahkan masalah baru yang tidak pernah ada seandainya tidak dipraktikkan sistem itu (Wibowo, 2011). Robert D. Kaplan mengutip pandangan Homer-Dixon dengan menyebut *Democracy is problematic* dan kelangkaan lebih dapat dipastikan. Kelangkaan yang dimaksudkan adalah soal hasil alam atau bumi, hutan, ikan dan seterusnya. Homer secara terang-terangan menyebut salah satu negara yang masuk di dalam kategori tersebut adalah Indonesia. Hal ini nyata, bahwa pemberlakuan sistem demokrasi sejak rezim

otoritarianisme ditumbangkan, justru menimbulkan problem-problem jenis baru yang sebelumnya tidak terjadi. Bentrok antar suku, ras dan agama, justru semakin massif sesaat setelah sistem itu diberlakukan (Kaplan, 2003).

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diadopsi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Sistem ini memberi kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik serta menikmati hak-hak seperti kebebasan berpendapat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi demokrasi di Indonesia menunjukkan penurunan. Menurut laporan *Democracy Index 2023* yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menempati peringkat ke-56 dengan skor 6,53, turun dua peringkat dibandingkan tahun 2022 yang mencatat skor 6,71. Penilaian indeks demokrasi EIU mencakup lima aspek utama, yaitu proses pemilu dan pluralisme, efektivitas pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dengan skor tersebut, Indonesia tergolong dalam kategori *flawed democracy* (demokrasi yang cacat). (Nababan, 2024) Penurunan serupa juga diungkapkan oleh *Freedom House*, yang mencatat skor demokrasi Indonesia turun dari 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024. Penilaian ini terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilu presiden, yang dinilai memanfaatkan berbagai strategi untuk mempertahankan dinasti politik di Indonesia (Yanwardhana, 2024).

Secara teori, demokrasi sejatinya membuka jalan seluas-luasnya bagi aspirasi rakyat. Namun pada kenyataannya, ketika pintu itu dibuka lebar bagi rakyat untuk menentukan jalannya negara, kelompok yang sangat kaya tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha meraih kekuasaan untuk menjaga dan mengembangkan kepentingannya. Akhirnya demokrasi berubah total dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan konglomerat. Abraham Lincoln (1860-1865) mengatakan demokrasi adalah "*From the people, by the people and for the people.*" Adagium itu berubah ketika Rutherford B. Hayes pada 1876 menyatakan kondisi demokrasi di Amerika adalah "*From company, by company and for company.*" Singkat kata, demokrasi secara alami akan bertransformasi menjadi wajah oligarki. Rakyat hanya sekedar dijadikan *vote getter* (pengumpul suara) (Fuad, 2007). Maka tidak dapat disangkal bahwa situasi ini

membawa negara pada berbagai problem serius. Masalah lingkungan hidup di berbagai daerah semakin parah. Industri ekstraktif menjadi ruang bagi oligarki untuk menguasai ekonomi nasional dan tetap mempertahankan kepemilikannya. Akan tetapi pada saat yang sama, banyak rakyat yang menderita. Hak hidup rakyat dirampas, ruang hidup masyarakat adat di ambil paksa. Oligarki bergerak bebas, sebab para pemimpin atau elit pemerintah telah berada dalam genggamannya oligarki yang telah 'membayar' biaya politiknya yang sangat mahal itu. Dampaknya adalah kerusakan alam termasuk masalah kemanusiaan di Kalimantan Timur khususnya menjadi persoalan genting yang perlu diperhatikan. Banyak korban nyawa akibat lubang-lubang tambang batu bara yang tidak ditutup kembali setelah para oligark itu mengambil harta kekayaan masyarakat setempat. Terakhir 2023 yang lalu terdapat 40 orang warga yang tewas akibat lubang raksasa yang masih menganga itu (CNN Indonesia, 2022).

Berbicara soal sistem demokrasi yang saat ini digunakan oleh Indonesia, Nirwana Br. Bangun dan Teja Rinanda (Br. Bangun & Rinanda, 2022) menyatakan bahwa oligarki memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia berupa terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat. Ketimpangan memiliki kaitan erat dengan kemiskinan, karena pada dasarnya mencerminkan kemiskinan relatif, yakni perbedaan antara kelompok kaya dan miskin. Tingkat ketimpangan yang rendah, atau distribusi pendapatan yang lebih merata ini menjadi salah satu aspek penting dalam agenda pembangunan ekonomi.

Muhammad Natsir dan Muhammad Ridha (Natsir & Ridha, 2018) menyatakan bahwa demokrasi elektoral yang kita praktekan saat ini belum cukup untuk memenuhi berbagai agenda penting dalam kehidupan berbangsa. Meskipun elektoralisme dapat menjadi salah satu langkah menuju demokrasi yang lebih mendalam dan bermakna, terjebak dalam perangkat elektoralisme hanya akan menyebabkan stagnasi demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi perlu dimaknai ulang, tidak hanya sebagai alat kontestasi kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sangat penting mengingat realitas yang

menunjukkan bahwa demokrasi elektoral sering kali gagal menghadirkan keadilan ekonomi dan lainnya. Padahal, demokrasi seharusnya menjadi jalan menuju emansipasi manusia di berbagai sektor kehidupan. Jangan sampai demokrasi malah menjadi alat bagi oligarki untuk terus mempertahankan dominasi kepemilikan mereka.

Dini Suryani dan rekan-rekannya (Suryani et al., 2021) mengungkapkan bahwa penguatan politik oligarki telah berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi, terutama dengan semakin terbatasnya ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat sipil, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Berkurangnya ruang partisipasi ini melemahkan kemampuan masyarakat sipil untuk mengawasi kebijakan dan tata kelola SDA. Akibat dari melemahnya demokrasi dalam pengelolaan SDA ini adalah meningkatnya intensitas konflik agraria serta kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, mereka secara khusus menyoroti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama dalam kaitannya dengan pelemahan proses demokrasi dalam tata kelola SDA.

Pandangan-pandangan di atas, mengakarkan pembahasan dan pandangan mereka mengenai demokrasi dan oligarki dalam beberapa hal antara lain soal masalah ketimpangan ekonomi. Adapun Muhammad Natsir dan Muhammad Ridha secara khusus membahas masalah demokrasi elektoral yang dapat menjadikan demokrasi sebagai ruang eksplorasi kekuasaan oligarki. Yang terakhir Dini Suryani, dkk memberi perhatian bagaimana kualitas demokrasi yang semakin menyempitkan partisipasi kelompok *civil society*. Oleh karena itu, yang akan menjadi kebaruan dari penelitian ini adalah realitas demokrasi Indonesia yang saat ini berada di bawah bayang-bayang oligarki. Hal itu kemudian memberi efek yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan hidup dalam keberadaan hidup masyarakat secara khusus pada masyarakat Kalimantan Timur yang menjadi lokus penelitian ini.

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode studi kasus (*instrumental case study*) penulis berusaha mendalami problematika kerusakan alam yang sudah dan sedang terjadi di Kalimantan Timur. Ada beberapa hal penting yang dilihat

antara lain *pertama*, konsep demokrasi dan oligarki dan perwujudannya di Indonesia yang memberi dampak pada problem itu. *Kedua*, penulis berusaha menggali hubungan antara demokrasi dan oligarki beserta tantangannya dan bagaimana oligarki memberi pengaruh bagi perjalanan negara demokrasi serta dampaknya bagi masyarakat yang secara khusus dalam lokus penelitian ini yaitu Kalimantan Timur? *Ketiga*, penulis memberi suatu otokritik terhadap demokrasi dan pengaruh oligarki terhadap problematika kerusakan alam di Kalimantan Timur.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*instrumental case study*). Creswell menyebut studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengamati secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2009). Penulis juga melakukan studi pustaka untuk memetakan konsep demokrasi secara utuh dan pengaruh oligarki dalam perwujudannya. Pemahaman itu akan menjadi landasan untuk mendalami dampaknya terhadap masalah-masalah kerusakan alam maupun dalam kehidupan masyarakat. Puncaknya, penulis membangun suatu otokritik terhadap berbagai problematika itu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Demokrasi dan Oligarki**

Ignatius Wibowo memulai pandangannya tentang demokrasi dengan melontarkan sebuah pertanyaan mendasar: "Apakah demokrasi saat ini benar-benar merupakan pilihan yang logis dan rasional?" Ia mengkritisi validitas anggapan bahwa demokrasi adalah solusi atas berbagai permasalahan di Indonesia saat ini. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa meskipun demokrasi merupakan sesuatu yang layak diperjuangkan, praktiknya justru sering menimbulkan banyak masalah, bahkan menciptakan persoalan baru yang mungkin tidak akan muncul tanpa demokrasi. Sebagai konsep yang kerap menjadi bahan kajian,

pandangan tentang demokrasi sangat beragam. Ada pihak yang percaya pada sistem ini dan mendukungnya, namun ada pula kelompok yang bersikap skeptis atau bahkan antipati terhadap demokrasi (Wibowo, 2011).

Robert D. Kaplan berpendapat bahwa demokrasi tidak bisa diterapkan secara seragam di semua negara atau wilayah. Dalam bukunya seperti *"The Coming Anarchy"*, Kaplan menekankan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan budaya tertentu sering kali menentukan keberhasilan demokrasi. Negara-negara yang memiliki tradisi institusional lemah atau konflik internal yang tinggi mungkin lebih sulit menerapkan sistem demokrasi secara efektif. Kaplan sering menyoroti bahwa demokrasi membutuhkan fondasi sejarah, budaya, dan sosial yang stabil, seperti keberadaan kelas menengah yang kuat dan pemerintahan yang fungsional (Kaplan, 2001).

Kaplan percaya bahwa dalam beberapa konteks, stabilitas politik lebih penting daripada demokrasi, terutama di negara-negara yang masih berkembang. Ia menganggap bahwa negara yang terlalu cepat mengadopsi demokrasi tanpa stabilitas institusi dapat jatuh ke dalam kekacauan atau kekerasan. Dalam situasi tertentu, Kaplan cenderung mendukung pemerintah otoriter yang efektif dalam memberikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebelum demokrasi penuh diterapkan. Kaplan menunjukkan bahwa demokrasi dapat memperburuk konflik internal di negara-negara dengan masyarakat yang terfragmentasi secara etnis, agama, atau budaya. Dalam konteks ini, demokrasi dapat memicu polarisasi, yang pada akhirnya melemahkan stabilitas negara. Kaplan juga mencatat bagaimana demokrasi dapat dieksploitasi oleh pemimpin populis yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri (Kaplan, 2001).

### **Definisi Oligarki dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi**

Ada banyak tokoh yang menyatakan bahwa oligarki merupakan satu konsep yang banyak digunakan, namun kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. James Payne misalnya menyatakan bahwa konsep oligarki "kacau balau". Atau kemudian Leach memberi cap baru bagi konsep oligarki yaitu "kurang spesifik". Maka Winters dalam bukunya yang berjudul *Oligarki* berusaha membangun suatu

pengertian yang teratur mengenai konsep oligarki. Menurutnya oligarki penting bagi pemahaman politik baik zaman dulu maupun sekarang. Maka ia berusaha membangun sebuah definisi yang jelas mengenai oligarki. Menurut Winters belumlah cukup jika sekedar mengikuti pandangan umum atau sekurang-kurangnya berdasar pada arti etimologisnya bahwa oligarki berarti “kekuasaan sekelompok kecil”. Maka Winters berusaha mempertegas dan mempertajam serta menerapkan teori oligark dan oligarki dengan menegaskan dasar material konsepnya mengikuti Aristoteles (Winters, 2011).

Menurut Winters oligarki adalah fenomena kekuasaan yang didasarkan pada konsentrasi kekayaan dan kemampuan elit ekonomi untuk mempertahankan serta melindungi kekayaan mereka dari ancaman, baik dari negara maupun masyarakat luas. Dalam bukunya yang fenomenal dalam dunia pemikiran tentang oligarki, Winters memperkenalkan sejumlah konsep kunci yang menjadi dasar teorinya. Menurut Winters, oligarki adalah kekuasaan yang berakar pada kekayaan material. Hal itu berbeda dengan definisi klasik yang melihat oligarki hanya sebagai bentuk pemerintahan oleh segelintir orang. Winters menyebut oligarki adalah struktur kekuasaan yang ada di berbagai sistem politik, baik demokrasi maupun otoritarianisme (Winters, 2011).

Winters berpendapat bahwa inti dari kekuasaan oligarki adalah kemampuan individu superkaya untuk mempertahankan kekayaan mereka (*wealth defence*). Terdapat dua mekanisme utama dalam *wealth defense* itu, pertama, *Income Defense* yang merupakan upaya untuk meminimalkan pengeluaran seperti pajak atau kontribusi lain kepada negara. Kedua, *Property Defense*. Melindungi aset dari ancaman penyitaan, nasionalisasi, atau pengambilalihan oleh pihak lain. (Koho, 2021) Kenyataannya, kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi. Hubungan dasar yang sama antara kekuasaan material dan politik dinyatakan kembali lebih dekat dengan zaman kita oleh Robert Dahl. Dahl merujuk kepada para “raja maling” (*robber baron*) kaya raya di Amerika Serikat pada paruh kedua abad kesembilan belas sebagai

kumpulan warga negara yang punya sumber daya berlebihan untuk dilibatkan dalam kehidupan politik (Winters, 2011).

Klaim sederhananya adalah bahwa distribusi sumber daya material di antara anggota-anggota suatu komunitas politik, demokratis atau yang lainnya, memiliki pengaruh besar pada kekuasaan relatif. Semakin tidak imbang distribusinya, semakin besar kekuasaan dan pengaruh orang-orang kaya, dan semakin kuat pula pengaruh kesenjangan material pada motif dan tujuan politik mereka. Karena hubungan uang dan kekuasaan nyaris niscaya di studi politik, maka mengagetkanlah apabila ada penolakan terhadap usul bahwa ketidaksetaraan besar dalam kekayaan menghasilkan ketidaksetaraan besar dalam kekuasaan dan pengaruh politik dalam demokrasi. Seorang kandidat politik yang memiliki uang segunung untuk berkampanye sangat sukar untuk dikalahkan. Gerakan politik yang dananya lancar lebih berpengaruh daripada yang dananya macet. Singkat kata, wujud demokrasi sangat besar ditentukan oleh pemilik modal. Uang menjadi penentu penguasa.

Winters mengidentifikasi empat tipe ideal oligarki (Febriani et al., 2021) antara lain:

1. **Oligarki Panglima.** Oligarki ini beroperasi melalui kekuasaan yang bersifat memaksa atau menggunakan kekerasan secara langsung. Mereka mengandalkan kekuatan militer dan persenjataan untuk merebut sumber daya dari oligarki lain. Dengan demikian, akumulasi kekayaan dalam oligarki panglima dilakukan melalui penaklukan antar panglima. Hal ini menyebabkan ancaman utama terletak pada klaim atas kekayaan daripada pendapatan. Contoh oligarki panglima dapat ditemukan pada masa prasejarah, Eropa abad pertengahan, serta konflik keluarga di Pegunungan Appalachia.
2. **Oligarki Penguasa Kolektif,** di mana kekuasaan dijalankan secara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan dan norma tertentu. Dalam model ini, para penguasa bekerja sama untuk mempertahankan kekayaan mereka dengan memerintah komunitas tertentu. Contoh oligarki penguasa kolektif meliputi komisi mafia, pemerintahan Yunani-Romawi, serta praktik politik di Indonesia pasca-Soeharto.

3. **Oligarki Sultanistik**, yaitu oligarki di mana monopoli atas sarana pemaksaan terkonsentrasi pada satu pihak oligarki. Dalam sistem ini, terdapat hubungan patron-klien antara oligarki utama dan oligarki lainnya. Kekuasaan dan penggunaan kekerasan sepenuhnya berada di tangan oligarki utama, sementara oligarki lain bergantung pada perlindungan dari penguasa tunggal untuk mempertahankan kekayaan mereka. Contoh oligarki sultanistik pernah terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto.
4. **Oligarki Sipil**, yang tidak memiliki kekuasaan langsung maupun akses terhadap kekuatan bersenjata. Dalam sistem ini, oligarki menyerahkan kekuasaannya kepada lembaga non-pribadi yang memiliki landasan hukum yang kuat. Fokus oligarki sipil adalah mempertahankan pendapatan mereka dengan menghindari kontrol negara dalam upaya redistribusi kekayaan. Oligarki sipil tidak selalu demokratis atau melibatkan pemilu. Misalnya, di Amerika Serikat dan India, oligarki ini bersifat demokratis secara prosedural, sementara di Singapura dan Malaysia, sifatnya lebih otoriter.

Dari keempat tipe oligarki ini, Winters kemudian menggolongkan Indonesia pada tipe yang ketiga yakni oligarki sultanistik. Alasannya adalah menurut Winters, kekayaan di Indonesia sangat terkonsentrasi pada sekelompok kecil elit ekonomi, termasuk konglomerat besar, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan negara. Para oligark ini kemudian melindungi kekayaan mereka melalui sistem hukum, kebijakan negara, atau bahkan patronase politik. Pada era pasca-Soeharto, meskipun ada demokratisasi formal, individu atau kelompok tertentu tetap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap arah politik, sering kali melalui hubungan patron-klien. Sistem seperti ini menunjukkan suatu karakter sultanistik, di mana pengaruh pribadi melebihi institusi formal. Maka kerap kali yang terjadi adalah kekuatan oligarki di Indonesia sering kali beroperasi melalui aliansi dengan aparat negara, seperti militer, polisi, atau birokrasi (Winters, 2011).

Pada kenyataannya bahwa ketika oligarki berkuasa, maka demokrasi pun ikut terdistorsi. Oligarki, cenderung menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi

keputusan politik demi melindungi kepentingan mereka. Yang paling sederhana adalah mereka dapat mendanai kampanye politik, membeli dukungan, atau melobi kebijakan yang menguntungkan mereka dan sering kali dengan cara mengorbankan kepentingan publik. institusi demokrasi seperti parlemen, pengadilan, dan media seringkali dilemahkan atau dikooptasi. Fungsi *checks and balances* terganggu karena pengambil keputusan politik lebih tunduk pada kepentingan oligarki daripada suara rakyat. Penyebabnya satu yaitu kekuasaan politis yang dimiliki orang-orang-orang di dalam institusi-institusi negara telah telah dipegang oleh oligark yang telah menggelontorkan banyak biaya untuk kursi kekuasaan itu atau yang sering disebut sistem patronase. Semuanya ini memberi dampak yang sangat buruk terhadap keberlangsungan bangsa yang mana mengenai dampak kekuasaan oligarki terhadap sistem demokrasi di Indonesia akan dibahas pada bagian berikut (Ismayani et al., 2022).

### **Problematika Lingkungan Hidup Di Kalimantan Timur**

Persoalan lingkungan hidup di Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya bukan lagi hal yang asing di negeri ini. Hutan dan air yang menjadi jantung kehidupan masyarakat, kini hanya bisa menyaksikan lubang-lubang raksasa bekas tambang batu bara. Kayu ulin yang mereka (orang Dayak) sebut kayu besi kini tersisa tunggulnya. Lalu kemana? Ini hanya sekedar rasa pilu yang pernah terungkap oleh masyarakat itu sendiri. Persoalan kerusakan alam di Kalimantan Timur semakin parah setelah masifnya industri ekstraktif seperti tambang batu bara terus berkembang di sana. Dalam analisa dan laporan *Global Forest Watch* pada tahun 2001, Kalimantan Timur memiliki 12,6 Mha hutan primer yang membentangi 64% area lahannya. Namun pada tahun 2023, itu kehilangan 49.0 kha hutan primer dan itu setara dengan emisi sebesar 39.0 Mt CO<sub>2</sub>. Pada tahun 2024 kerusakan Kawasan hutan dengan berbagai jenis kerusakannya antara lain akibat pembalakan liar mencapai 1.105,27 ha, perambahan hutan 9.096,77 dan akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai 18.451 ha (Global Forest Watch, 2022).

Persoalan rusaknya hutan atau alam di bumi Kalimantan Timur ini tidak terlepas dari masuknya perusahaan-perusahaan tambang batu bara berskala besar. Kehadiran tambang batu baru itu tidak kemudian memberi kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Kesejahteraan hanya dialami oleh segelintir orang. Kehadiran mereka justru menghadirkan banyak problem dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat kehilangan lahan baik secara pribadi maupun kolektif, air bersih, polusi udara dan tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai sektor. Perusahaan-perusahaan itu kemudian meninggalkan lubang-lubang raksasa yang cukup sering menjadi jurang maut bagi warga setempat. Terakhir dicatat sebanyak 40 korban jiwa akibat pada tahun 2022 (*Kompas 6 Januari 2021*) Singkat kata, kehadiran Perusahaan itu tidak memberi dampak yang baik bagi masyarakat setempat, akan tetapi justru memberi dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Persoalan ini justru ditanggapi dengan tertawa oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dalam wawancara yang ditampilkan dalam sebuah film dokumenter berjudul *Sexy Killers*. Dia mengatakan jika korban jiwa akibat lubang-lubang bekas tambang itu adalah nasib mereka untuk mati secara demikian. Pemerintah seolah-olah berusaha membentengi diri terhadap berbagai problem yang dialami oleh masyarakat.

Salah satu penyebab masifnya pembukaan industry tambang batu bara adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP secara nasional pada per 2017 berjumlah 8.710 yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Di Kalimantan Timur sendiri menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per November 2021, terdapat 476 izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur, yang terdiri dari 437 IUP, 1 IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), 1 KK (Kontrak Karya), dan 37 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Namun, pada Februari 2022, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut 34 IUP batubara di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pada Juni 2023, tercatat ada 338 IUP yang mencakup lahan seluas 3,26 juta hektar di Kalimantan Timur, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 134 izin. Perubahan jumlah

IUP ini mencerminkan dinamika regulasi dan penataan izin pertambangan di Kalimantan Timur (JATAM Kaltim, 2024).

Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak terkendali oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan luas terhadap lingkungan serta masyarakat. Ironisnya, batu bara tetap menjadi komoditas tambang utama di Indonesia, dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, Cina, dan Australia sebagai konsumennya. Padahal, pertambangan batu bara merupakan industri ekstraktif berskala besar yang sangat bergantung pada lahan, air, dan energi, menjadikannya salah satu industri yang paling boros sumber daya. Masalah ini menjadi semakin menyedihkan ketika lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan berasal dari perampasan tanah milik masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, termasuk tanah ulayat dan tanah komunal lainnya (JATAM Kaltim, 2024).

Persoalan lain dari hadirnya industri pertambangan batu bara serta munculnya berbagai problem secara khusus kerusakan alam adalah pemerintah yang kerap kali bersikap 'bodo amat'. Dalam menghadapi berbagai problem itu, tidak sedikit orang atau kelompok yang berusaha atau berjuang untuk menyadarkan pemerintah agar kemudian pemerintah memberi suatu jalan keluar terhadap problem-problem itu. Para NGO misalnya seringkali menyurati pemerintah atau bahkan melakukan aksi damai (demonstrasi) untuk menyadarkan pemerintah soal problem-problem itu. Namun seringkali suara 'kenabian' itu diabaikan dari bilik-bilik berhiaskan kursi elegan. Tindakan ketidakadilan Perusahaan-perusahaan tambang batu bara terhadap masyarakat akar rumput atau masyarakat adat, masih terus langgeng karena seringkali diabaikan pemerintah. Sikap 'bodo amat' itu dapat ditinjau dari berbagai aspek dan salah satunya adalah pengaruh janji politik dan utang politik atau yang disebut dengan sistem patronase. Sistem ini dapat dipastikan akan membungkam suara kebijaksanaan pemerintah yang pro masyarakat kecil. Semua kebijakan diatur atau minimum diarahkan oleh oligark super kaya (JATAM Kaltim, 2024).

Pemerintah dalam konteks tertentu menjadi ruang ketidakadilan itu sendiri. Contohnya Pemerintah seringkali secara sepihak memberi Ijin Usaha kepada Perusahaan tertentu tanpa adanya diskusi dengan masyarakat setempat. Hal ini seringkali terjadi dan masyarakat menjadi korban pencaplokan tanah oleh pemilik Perusahaan tertentu. Sejatinya mengenai pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dilakukan dengan melibatkan Masyarakat, pasal 26 ayat (2) yang mengatur bahwa pelibatan Masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan, lalu pasal 26 ayat (3) mengatur lebih lanjut terkait yang disampaikan pada ayat 1, yaitu Masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk Keputusan dalam proses AMDAL (JATAM Kaltim, 2024b).

Pemerintah seringkali mengabaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pertambangan itu serta melemahnya kebijakan yang pro pada rakyat kecil dan pelestarian alam karena masalah politik yang menggunakan sistem patronase. Dalam hal ini mulut para elite pemerintahan terisolasi oleh kekuatan oligarki yang telah membawa dia (elite pemerintahan) pada panggung itu. Sebab lain adalah para elite politik adalah pemilik dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi itu. Orang-orang seperti Aburizal Bakrie (PT. Bumi Resources Tbk), Luhut Binsar Panjaitan (PT. Toba Sejahtera), Prabowo Subianto (Grup Bisnis Nusantara), hingga Erick Thohir (PT. Adaro Energy Indonesia Tbk) adalah nama-nama yang terafiliasi dengan Perusahaan-perusahaan tambang berskala besar itu. Maka tentu akan sulit bagi pemerintah sendiri untuk memberi suatu jalan keluar bagi berbagai problem yang dimunculkan dari hadirnya industri pertambangan itu. Pemerintah akan terus menjadi pengkhianat bagi rakyat kecil. Kerusakan alam akan semakin parah dan kesenjangan sosial akan terus meningkat (JATAM Kaltim, 2024a).

## **Demokrasi, Oligarki dan Kerusakan Alam di Kalimantan Timur**

Dalam artikelnya Kaplan mengulangi pandangan Homer Dixon yang mengatakan bahwa perang di masa depan dan kekerasan sipil sering kali akan muncul akibat kelangkaan sumber daya seperti air, lahan pertanian, hutan, dan ikan. Sebagaimana akan ada perang dan arus pengungsi yang dipicu oleh masalah lingkungan, akan muncul pula rezim praetorian atau seperti yang ia sebut, “rezim keras” yang didorong oleh tekanan lingkungan. Negara-negara dengan kemungkinan terbesar untuk mengadopsi rezim keras, menurut Homer-Dixon, adalah negara-negara yang terancam oleh menurunnya basis sumber daya alam. Dixon menyebut salah satu negara kandidatnya adalah Indonesia. Bagi Dixon, demokrasi adalah sistem problematik, dan kelangkaan adalah sesuatu yang pasti (Kaplan, 2003).

Pandangan sinis terhadap demokrasi juga datang dari pemikir-pemikir Indonesia seperti Ignatius Wibowo. Menurutnya demokrasi adalah sistem yang malah menghasilkan banyak masalah, bahkan masalah baru yang tidak akan ada seandainya tidak dipraktikkan sistem itu. Sebagai salah satu yang banyak dikaji, konsepsi tentang demokrasi pun beragam. Terdapat dualitas pandangan, antara lain ada pihak yang percaya terhadap sistem ini, namun tidak sedikit juga yang antipati terhadapnya. Hal itu nyata bahwa di negeri ini dengan berlakunya sistem itu, tidak serta-merta menyelesaikan masalah-masalah di negeri ini. Kehadiran demokrasi justru membuka peluang bagi masifnya problematika anarkisme di negeri ini.

Demokrasi semakin memburuk ketika sistem itu berada di bawah bayang-bayang oligarki. Oligarki sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan besar terhadap peredaran ekonomi nasional atau katakanlah memiliki kekuasaan material yang sangat besar, seringkali menggunakan demokrasi sebagai ruang untuk mempertahankan kepemilikannya atau asetnya. Keadaan itu semakin dipermudah oleh mahalnya biaya perpolitikan dalam sistem demokrasi di negeri ini. Maka para oligark menggunakan sistem patronase untuk tetap menjaga kekayaan mereka dengan menunggu imbalan dari para elite politik yang didukung yang tentu saja berupa biaya kampanye dan semacamnya. Imbalan itu bisa berupa kebijakan-

kebijakan yang semata-mata menguntungkan mereka dan lain sebagainya. Hal ini memberi dampak yang makin buruk terhadap dinamika kehidupan masyarakat, termasuk juga soal ketahanan kekayaan alam bangsa ini.

Dalam kasus kerusakan alam, kajian yang ditemukan, bahwa kehadiran industri-industri ekstraktif seperti tambang batu bara adalah penyumbang terbesar terhadap rusaknya hutan Kalimantan, secara khusus di Kalimantan Timur. Terakhir tahun 2024 terdapat 44.736 titik bekas lubang tambang batu bara di daerah itu. Penyebabnya dalam studi kasus ditemukan bahwa pemerintah masih seringkali bersikap “bodo amat” terhadap suara kaum kecil yang berteriak meminta keadilan, mereka menutup mata terhadap problem yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah melemahnya kebijakan pemerintah yang disinyalir, bahwa itu adalah teknik untuk membiarkan para oligark yang telah berkontribusi besar dalam mengangkat mereka ke atas kursi kekuasaan politis untuk memperkuat kekuasaan material mereka (oligark). Yang ketiga adalah ‘perselingkuhan’ antara Perusahaan, birokrat dan politisi. Pada bagian sebelumnya disebutkan beberapa elite politik nasional yang ikut bergerak dalam pertambangan batu bara. Maka logiknya adalah ‘tidak mungkin ingin melukai diri sendiri sejauh mereka masih dapat mengatasinya’.

Pada situasi demikian, demokrasi yang sejatinya untuk kesejahteraan rakyat, kemudian terdistorsi menjadi ruang kekuasaan oligarki untuk mengamankan kekayaan, harta atau kepemilikannya. Pernyataan Homer Dixon yang dikutip oleh Kaplan tidak meleset dari kenyataan yang terjadi di negeri ini. Demokrasi yang tumbuh di bumi yang memiliki kekayaan alam yang besar, pada gilirannya akan menjadi hancur. Demokrasi kehilangan taringnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Ketika tanah masyarakat diambil paksa oleh sang empunya Perusahaan atau para oligark, mereka (masyarakat) tidak bisa berbicara banyak, karena pada penguasa Perusahaan itu telah “menyemai cinta” dengan institusi negara seperti polisi maupun militer. Dwi fungsi tentara dan polisi kini bukan lagi pertahanan

keamanan seperti yang tercetus selama masa Orde Baru, melainkan menjadi pencatuk tanah bagi keberlangsungan hidup para elite dan oligark.

Kehadiran tambang-tambang itu pada kenyataannya tidak memberi harapan hidup yang baik untuk masyarakat. Persoalan justru semakin kompleks. Kerusakan alam terus bertambah, krisis air bersih terjadi di berbagai daerah, polusi udara dan yang terakhir kenaikan suhu global. Dalam hal ini peningkatan emisi gas rumah kaca meningkat dari 280 ppm sebelum era industri menjadi lebih dari 420 ppm pada 2023. Beberapa penyebabnya adalah industri, deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Pada saat yang sama pemerintah terus berteriak untuk membatasi kenaikan suhu. Ini suatu "ilusi". Bahwa pada satu sisi kerusakan alam itu disebabkan oleh kekuasaan yang tidak terkontrol dari dalam ruang pemerintahan. Hakikat sistem demokrasi ditumbangkan oleh kekuatan oligarki. Lalu pada sisi yang lain, mereka berteriak untuk sesuatu yang mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Maka problematika ini menjadi catatan penting bagi perwujudan demokrasi dan jalannya pemerintahan di negeri ini.

## **KESIMPULAN**

Robert D. Kaplan berpendapat bahwa demokrasi tidak bisa diterapkan secara seragam di semua negara atau wilayah. Menurutnya, demokrasi akan lebih ideal dan tentu saja berhasil jika diterapkan di negara-negara dengan stabilitas institusi dan politik yang sudah baik atau mapan. Negara yang masih dihuni oleh masyarakat yang seringkali terfragmentasi oleh persoalan etnis, agama atau budaya, akan cukup sulit untuk mencapai suatu sistem demokrasi yang ideal di dalamnya. Begitupun dengan stabilitas politik dan institusi yang belum matang, seringkali sulit mencapai keberhasilannya. Hal itu nyata di Indonesia, bahwa ketika sistem demokrasi itu dipakai dalam keadaan belum matangnya institusi pemerintahan dan politik, maka akan sia-sia. Pemerintah hanya akan menghabiskan biaya untuk ritual-ritual politik demokratis, namun hasilnya tidak sama sekali memberi dampak positif bagi masyarakat. Pada saat yang sama, oligarki yang berkuasa di balik perhelatan politik

itu akan menjadikan ruang demokrasi itu sekedar untuk memperkuat pertahanan kekayaannya atau kepemilikannya. Maka seperti yang dikatakan I. Wibowo, bahwa persoalan baru justru akan semakin bertambah di dalam pelaksanaan sistem demokrasi itu. Salah satu yang kini menjadi ratapan masyarakat adalah rusaknya alam karena masifnya deforestasi untuk tambang batu bara. Singkat kata, demokrasi menjadi lemah di hadapan praktek politik yang memilukan. Demokrasi tunduk di hadapan oligarki. Demokrasi tidak bisa berkembang menjadi ideal di negeri ini, karena masih dikuasai oleh kekuatan oligarki yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kekayaan pribadinya.

### **Rekomendasi**

1. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan serta bentuk implementasi dari kebijakan-kebijakan itu sendiri. Kerap kali kebijakan itu baik, akan tetapi nihil dalam pelaksanaannya. Pada kenyataannya bahwa dalam menghadapi persoalan kerusakan lingkungan alam di Kalimantan Timur, Pemerintah seringkali lemah dalam penegakan hukum. Kebijakannya dapat saja baik secara teori, namun dalam implementasinya masih terlihat sangat lemah. Hal itu menyebabkan persoalan-persoalan seperti deforestasi, tanggung jawab terhadap bekas galian tambang terus bertambah tanpa adanya penegakan hukum yang tegas.
2. Kepentingan politik. Masalah kepentingan politik seringkali menjadi penghalang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan atau bersikap tegas terhadap berbagai persoalan yang terjadi seperti kerusakan alam akibat tambang dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah seringkali lemah dihadapan kekuasaan oligarki yang berusaha untuk tetap mempertahankan kekayaannya. Suara untuk memperbaiki sistem demokrasi sepertinya menjadi jargon yang terlalu sering disuarakan, namun tidak ada tindak lanjut dari pemerintah sendiri. Hal seperti ini sukar diaktualisasikan karena ada “perselingkuhan” dalam berbagai sektor, baik pengusaha, birokrasi maupun politisi. Maka dalam hal ini kekuatan aliansi masyarakat menjadi sangat penting. NGO (Non-Governmental Organization) yang datang dari masyarakat yang

sedang berkelu-kesah menjadi tameng yang kuat untuk melawan kebobrokan di ruang-ruang pemerintahan.

3. Pendidikan politik. Peneliti merekomendasikan adanya pendidikan politik. Hal itu tidak untuk para politisi atau partai-partai politik, karena pada kenyataan itu tidak berguna. Pada akhirnya terjadi korupsi dan juga terjadi pembegalan kebijakan pemerintah dari orang-orang partai itu sendiri. Maka yang ditekankan disini adalah masyarakat dalam berbagai kalangan. Masyarakat perlu *melek* politik. Tujuannya agar masyarakat tidak dibodohi oleh praktik politik yang busuk dan justru untuk kepentingan pribadi politikus itu sendiri. Pendidikan politik itu penting untuk melawan suara-suara retorik yang tidak berfaedah bagi perkembangan hidup masyarakat.

## REFERENSI

- Br. Bangun, N., & Rinanda, T. (2022). Pengaruh Oligarki Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 338–346. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.264>
- CNN Indonesia. (2022). Lubang Bekas Tambang Kaltim: 40 Tewas sejak 2011, Didominasi Anak. *CNN Indonesia*.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Febriani, A., Istanti, D. J., & Wibowo, P. (2021). Teori Oligarki Winters Atas Penambangan Batubara Di Kalimantan Timur. *Cices*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.33050/cices.v7i1.1210>
- Fuad, F. (2007). Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi. *Lex Journalica*, 5(1), 9–18.
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385–395. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.269>
- Kaltim, J. (2024a). *Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara*. JATAM

- Kaltim. <https://jatamkaltim.org/buku/coalruption-elit-politik-dalam-pusaran-bisnis-batu-bara>
- Kaltim, J. (2024b). *Sebelas Keluarga di Geleo Asa Berpotensi Menjadi Korban Pelarangan Mengakses Kebun oleh Pihak PT. Pari Coal-Adaro*. JATAM Kaltim. <https://jatamkaltim.org/siaran-pers/sebelas-keluarga-di-geleo-asa-berpotensi-menjadi-korban-pelarangan-mengakses-kebun-oleh-pihak-pt-pari-coal-adaro>
- Kaplan, R. D. (2001). The Coming Anarchy. In *Atlantic*. Random House New York.
- Kaplan, R. D. (2003). THE COMING ANARCHY. *The Chesterton Review*, 29(1), 65–66. <https://doi.org/10.5840/chesterton2003291/212>
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60–73. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.6>
- Nababan, W. M. C. (2024). Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam. *Kompas.Id*.
- Natsir, M., & Ridha, M. (2018). Terjebak Elektoralisme: Catatan Tentang Demokrasi Indonesia Dua Dekade Terakhir. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 234–248. <http://www.lakpesdam.or.id>.
- Suryani, D., Izzati, F. F., Syafi'i, I., Adaba, P. Y., & Satriani, S. (2021). Kemunduran Demokrasi Tata Kelola Sda: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 173–189.
- Timur), J. K. (Jaringan A. T. K. (2024). *Oligarki Ekstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup*. Jatam Kaltim. <https://jatamkaltim.org/buku/oligarki-ekstraktif-dan-penurunan-kualitas-hidup-rakyat>
- Watch, G. F. (2022). Indonesia Deforestation Rates & Statistics. In *Global Forest Watch*.
- Wibowo, I. (2011). *Negara dan Bandit Demokrasi*. Kompas.
- Winters, J. A. (2011). Oligarki. In ... *Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan ...* (pp. 1–505). Kompas Gramedia.
- Yanwardhana, E. (2024). Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Jokowi Bilang Gini. *CNBC Indonesia*.